BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menjadi renungan sebagai anak bangsa, mengapa sebagian negara bisa menjadi gagal, sedangkan di sebagian negara lainnya berkembang sangat pesat dan hebat. Sebagian lain penuh kemakmuran, tapi ada sebagian lain justru mempertontonkan perebutan kekuasaan hingga berdarah-darah, bahkan memunculkan konflik yang berkepanjangan. Bukankah negara ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga mereka dapat hidup sejahtera. Jangan sampai negara yang sudah susah payah dibentuk dengan perjuangan panjang dan tetesan darah, justru mengalami kegagalan diakibatkan ketidak berhasilan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. Kegagalan negara bisa dikarenakan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang datang terhadap negara.

Berdasarkan *Failed State Index (FSI)* 2023, Indonesia berada pada peringkat ke-96 dari 178 negara yang dinilai, dengan skor total 67.8 poin. Posisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori "Warning" (Peringatan), yang berarti berada di tingkat menengah dalam skala kerapuhan Negara. Ini semestinya menjadi perhatian, Indonesia dikatakan berindikasi menuju negara gagal (Kovacı & Şen, 2022; Wardhani, 2018). Riset ini mendapat berbagai macam kritik dan tanggapan dikarenakan ketidaksesuaian riset dengan kondisi real di negara ini, atau berlawanan dengan kenyataan yang ada. Hasil riset tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan semua warga Indonesia, hal ini tetap menjadi warning kondisi negara Indonesia, pemerintah boleh mengkritisi hasil riset ini, tetapi perlu juga dijadikan sebagai bahan renungan terhadap hasil riset tersebut untuk memperbaiki negara ini, agar Indonesia tidak menjadi negara gagal seperti yang terjadi di beberapa Negara Afrika (Somalia dan Kongo), dan Eropa (Yugoslavia) (Yuniarti et al., 2021). Negara-negara tersebut dianggap gagal karena tidak

mampu dalam menjalankan fungsinya. Di sana bermunculan sindikat-sindikat penjahat berkoalisi dengan elit, sementara pelayanan publik, seperti keamanan, kesehatan, pendidikan, sanitasi, transportasi umum, terus mengalami kemerosotan. Munculnya kelompok radikalisme terus mendorong terhadap kemerosotan bangsa. Dekadensi politik, disfungsi institusional, dan korupsi sistemik, yang sering kali dipicu oleh maladministrasi, kleptokrasi, serta otoritarianisme disfungsional. Fenomena ini dapat memperburuk instabilitas sosial, fragmentasi politik, dan polarisasi masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan risiko konflik struktural dan disintegrasi nasional.

Bahaya yang paling besar adalah ancaman terhadap keamanan nasional dalam bentuk perlawanan bersenjata dan merupakan ancaman keamanan internal sebagai puncak eskalasi tantangan hambatan, dan gangguan terhadap rakyat. Ancaman bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba atau serta-merta. Ancaman merupakan hasil dari sebuah proses ekskalatif yang bermula dari tantangan, hambatan, dan/atau gangguan yang tidak terkelola dengan baik sehingga kemudian berubah menjadi ancaman (Aprillian et al., 2024; Razi et al., 2024). Tantangan, gangguan dan hambatan yang pada awalnya tidak membahayakan namun tidak dapat diantisipasi, dikelola, ditangani atau dihadapi dengan baik kemudian akan berproses dan mencapai titik puncaknya, titik puncak yang kemudian membahayakan keamanan nasional, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Akumulasi tantangan, hambatan dan gangguan dapat menjadi ancaman potensial. Ancaman potensial merupakan ancaman yang mungkin terjadi namun belum terjadi, sementara ancaman aktual merupakan ancaman potensial yang kemudian terus berkembang hingga benar-benar terjadi dan membahayakan keamanan nasional. Potensi ancaman dapat merupakan tantangan, hambatan atau gangguan yang terus berproses, dan terus berkembang baik disadari maupun tidak disadari sampai pada tingkat yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Berdasarkan bentuknya, ancaman terbagi atas ancaman potensial dan ancaman aktual (Alfajri et al., 2019; Zahara & Rizky, 2020). Ancaman aktual meliputi, antara lain: konflik perbatasan, kegiatan pelanggaran baik di darat,

laut maupun udara, konflik pulau-pular terluar, terorisme, bencana alam, dan radikalisme. Sedangkan ancaman potensial, antara lain meliputi: pencemaran lingkungan, pandemi, dan *Chemical, Biology, Radiation, Nuclear, and Explosive (CBRN-E).* Setiap ancaman nasional harus dapat diukur tingkat kebahayaannya. Untuk menghadapinya dibutuhkan kemauan politik *(political will)* atau kebijakan *(policy)* yang proporsional. Penilaian terhadap ancaman harus didasarkan pada fakta *(based on fact)*, tidak mengganggap remeh *(underestimate)* atau justru sebaliknya terlalu dibesar-besarkan *(overestimate atau overvalue).* Untuk itu dilakukan tiga langkah; Pemeriksaan (check), Pemeriksaan ulang (recheck) dan Pemeriksaan silang (cross check) (Pires et al., 2024). Tingkat ancaman pada umumnya dinilai dengan tingkat penilai rendah *(low)*, sedang atau menegah *(middle* atau *moderate)*, tinggi *(high)*, hingga sangat tinggi *(very high).* Pengukuran tingkat ancaman dilakukan melalui penilaian terus menerus terhadap potensi-potensi ancaman didasarkan pada eksklasi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang satu sama lainnya memiliki keterkaitan atau hubungan. Informasi tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang fenomenal, menunjukan adanya indikasi- indikasi tertentu yang perlu mendapatkan perhatian ditelaah untuk kemudian menjadi fakta-fakta dan selanjutnya dianalisa guna mendapatkan kesimpulan tentang ancaman potensial. Proses pengumpulan, pengolahan hingga pendistribusian informasi yang sudah diolah ini kemudian dikenal sebagai proses intelijen dan informasi atau bahan keterangan yang sudah diolah tersebut dikenal sebagai intelijen. Usaha atau kegiatan tersebut dikenal sebagai deteksi dini *(early detection)*, sebuah usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik nasional, regional maupun internasional. Dari usaha atau kegiatan deteksi dini yang terus menerus, akan ditemukan adanya potensi ancaman. Guna mencegah ancaman potensial berkembang menjadi ancaman aktual, intelijen berfungsi untuk memberikan peringatan dini *(early warning)* kepada pembuat kebijakan *(policy makers)* sebagai bahan pertimbangan atau dasar daam pembuatan kebijakan dan terutama kepada para pengambil keputusan *(decision makers)* tidak saja digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam penentuan kemauan politik *(political will)* tetapi yang dibutuhkan terutama dalam proses pengambilan keputuasan *(decision making).* Upaya-upaya intelijen ini dilakukan guna melindungi kepentingan nasional *(national interest)* dan keamanan nasional *(national security).*

Disisi lain Globalisasi telah membawa dunia pada tatanan baru *(new order)* yang seakan menghilangkan sekat atau bahkan batas negara (Diener & Hagen, 2024). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa peradaban manusia pada tatanan baru dengan berbagai kemudahan, terutama di bidang teknologi informasi *(information technology)* (Baldwin, 2016; Hughes, 2004). Teknologi informasi terutama internet, telah membawa peradaban manusia dengan berbagai kemudahan yang kemudian justru menjadikan manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari, internet telah menjadi segalanya *(Internet of Things/IoT).* Di sisi lain, kemudahan transportasi telah memperpendek waktu tempuh dan memudahkan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain atau bahkan sari satu kawasan ke kawasan lain. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan transportasi juga berdampak pada sifat ancaman, ancaman nasional dapat berkembang menjadi ancaman regional atau bahkan menjadi ancaman global. Dampak dapat berpengaruh secara multidimensional, beberapa atau salah satu aspek (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Namun, yang justru sering terjadi ancaman berdampak secara multidimensional. Ancaman pada aspek ideologi yang bersumber dari kelompok-kelompok radikalis dapat menjelma menjadi ancaman keamanan dalam bentuk aksi-aksi terorisme. Demikian halnya dengan ancaman sosial budaya, perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat kerap memicu konflik sosial. Konflik yang tercipta akan menggangu roda perekonomian dan pada akhirnya juga berdampak pada aspek ekonomi. Jenis-jenis ancaman terdiri atas ancaman militer dan ancaman non militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan biasanya merupakan ancaman dari luar negeri, dengan bentuk ancamannya, antara lain: invasi, agresi, pelanggaran wilayah kedaulatan oleh militer asing, spionase,

sabotase, dan blokade wilayah negara. Ancaman non-militer dapat berupa ancaman bersenjata dan tidak bersenjata yang merupakan ancaman dalam negeri dan keamanan publik. Bentuk ancaman bersenjata antara lain meliputi: pemberontakan bersenjata, separatisme, terorisme, pembajakan bersenjata, dan penyanderaan bersenjata. Bentuk ancaman tidak bersenjata antara lain, meliputi: ideologi radikalisme, intimidasi politik, penghancuran nilai budaya dan moral, persaingan ekonomi yang tidak sehat (dumping, pemalsu, pembajakan produk), dan kejahatan trans-nasional *(cybernetic*, narkoba, dan pasar gelap). Ancaman potensial dan ancaman aktual yang dominan saat ini memang jenis ancaman nonmiliter, baik bersenjata maupun tidak bersenjata. Tidak dapat dipungkiri, meskipun ancaman bersenjata masih terjadi, ancaman tidak bersenjata merupakan bentuk ancaman yang lebih dominan. Ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keagaamaan atau bahkan nilai-nilai yang bersumber dari kearifan lokal semakin menguat dan membahayakan.

Globalisasi memang menguntungkan dari beberapa aspek, seperti aspek ekonomi. Namun, pengaruh negatif dari globalisasi juga mengancam sistem nilai yang dimiliki dan dijaga selama ini oleh bangsa Indonesia. generasi muda sebagai generasi penerus bangsa merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ancaman tidak bersenjata. Ancaman militer dan ancaman non militer dapat berasal dari sumber yang sama sebagai usaha atau kegiatan yang simultan dan dengan tujuan serta sasaran yang sama. Kolaborasi ancaman militer dan ancaman non militer ini kemudian juga dikenal sebagai ancaman hibrida *(hybrid threat).* Sumber ancaman dapat berasal dari internal yaitu dari dalam negeri atau eksternal yaitu dari luar negeri. Sumber ancaman merupakan negara asal aktor yang melakukan usaha atau kegiatan yang membahayakan eksistensi bangsa dan negara lainnya. Aktor yang melakukan ancaman tidak harus selalu pemerintahan negara tetapi juga aktor non negara. Negara yang menjadi sumber ancaman tidak selalu merupakan negara tunggal atau hanya satu negara saja, tetapi juga dari terdiri dari beberapa negara baik dalam struktur koalisi negara atau aliansi negara dengan musuh atau lawan bersama. Aktor non negara dapat berupa

kelompok kepentingan, kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yang sama dengan sasaran dan tujuan yang sama. Aktor non negara lainnya adalah gabungan para petarung atau petempur asing *(foreign fighters)* yang memiliki kesamaan ideologi radikalisme. Kelompok ini merupakan kelompok trans-nasional yang tidak lagi dibatasi oleh kewarganegaraan tetapi mempersatukan diri dalam cita-cita dan tujuan yang sama untuk membentuk tatanan baru yang mereka percayai didasarkan pada ideologi yang membentuk cara berpikir, bersikap dan bertingkah-laku. Eksklusivitas mewarnai kelompok ini, di mana setiap orang yang tidak memiliki cara pandang atau cara berpikir yang sama meskipun berasal dari satu keluarga yang sama kan dipandang sebagai orang di luar kelompok mereka dan menjadi pihak yang berseberangan sehingga pantas untuk dimusuhi.

Radikalisme adalah ancaman nyata yang ada di negara saat dahulu hingga sekarang (Faiqah & Pransiska, 2018). Radikalisme merebak di tanah air sejak kemerdekaan, dan sampai dengan saat ini telah terjadi metamorfosa yang berkelanjutan guna mempertahankan eksistensinya. Hal yang perlu dipahami dalam perkembangannya, beberapa organisasi di Indonesia mulai menganut paham radikalisme, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Forum Umat Islam (FUI). Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Ansharut Tawhid (JAT). Bentuk radikalisme tersebut, mulai dari berbentuk pemikiran/gagasan hingga berbentuk tindakan (fisik maupun retorik). Radikalisme berbentuk pemikiran atau gagasan, salahsatunya seperti ide “Khilafah Islamiyah” yang sering digulirkan oleh Hizbut Tahrir. Gagasan tersebut, menurut HTI merupakan bentuk ideal yang merupakan muara dari segala bentuk cita-cita dan perjuangan Islam formalistik. Sedangkan radikalisme dalam bentuk tindakan atau retoris dapat dicerminkan dari aksi pemboman yang telah terjadi di tanah air sejak zaman Orde Baru hingga saat ini. Munculnya gerakan radikalisme di tanah air di sebabkan berbagai macam alasan. Seperti perasaan teralienasi, marginalisasi, militansi idiologi selain Ideologi Pancasila yang terwejahwantahkan melalui aksi radikal. Secara umum ada tiga kecenderungan yang menjadi indikasi radikalisme.

1) Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang

berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak.

2) Radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikalis berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai pengganti dari tatanan yang ada. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata *'radic',* sikap radikal mengandalkan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar.
3) Kuatnya keyakinan kaum radikalis akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan panafsiran kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara- cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti kerakyatan atau kemanusiaan.

Kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional dikalangan kaum radikalis. Pada kenyataanya radikalisme di Indonesia lebih didominasi oleh kuatnya keyakinan terhadap ideologi yang dibawa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Farinelli & Marinone, 2021) bahwa radikalisme dan anarkisme dapat muncul akibat berbagai persoalan yang bermuara pada akarnya, yaitu ideologi dan ketidakpuasan. Terdapat banyak faktor yang dapat membuat seseorang menjadi intoleran dan berpaham radikal, kondisi ini dapat terkena pada semua golongan masyarakat dari strata manapun, baik miskin atau kaya, tua atau muda, berpendidikan tinggi atau berpendidikan rendah, mereka semua bisa berpotensi menjadi seseorang yang terapapar paham radikal dan bersikap intoleran. Radikalisme cukup berbahaya dan sampai dengan saat ini masih eksis di bumi Indonesia. Untuk itu perlu penananganan yang serius dari negara melalui pemerintah. Salah satu sumber radikalisme yang sangat kuat di tanah air adalah kuatnya keyakinan kaum radikalis akan kebenaran

program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan panafsiran kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti kerakyatan atau kemanusiaan. Guna menentang aktifitas radikalisme agar tereliminir dari bumi pertiwi ini, adalah dengan memenangkan pertarungan antar ideologi-ideologi gerakan. Artinya Pertarungan ideologi harus dimenangkan melalui penguatan ideologi negara. Pancasila merupakan suatu konsensus para Founding Fathers dan sejak 18 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai landasan filosofis dalam membangun bangsa. Namun, dalam perjalanannya, masih terdapat pertarungan ideologi yang seharusnya telah final. Oleh karena itu, diperlukan strategi nyata dalam mempertahankan dan memperkuat ideologi negara, salah satunya melalui Pendidikan Bela Negara yang bertujuan membentuk karakter kebangsaan yang kokoh.

Dalam konteks pelayanan pembinaan, Pendidikan Bela Negara dilaksanakan oleh berbagai lembaga, seperti Kementerian Pertahanan, TNI, dan institusi pendidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai cinta tanah air, serta menyiapkan masyarakat dalam menghadapi ancaman ideologi transnasional. Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Kementerian Pertahanan RI, “Pendidikan Bela Negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam rangka membangun karakter bangsa yang tangguh dan berdaya saing” (Kemhan_RI, 2015).

Dari aspek penetapan kurikulum, Pendidikan Bela Negara diintegrasikan dalam sistem pendidikan formal, baik pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah, nilai-nilai bela negara diajarkan melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta sejarah nasional. Sementara itu, di perguruan tinggi, program ini diterapkan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan serta pembinaan Resimen Mahasiswa (Menwa). Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8

Tahun 2021, “Pendidikan Bela Negara menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, dan integritas” (Pertahanan, Kementrian Indonesia, 2024).

Dari segi struktur organisasi, program ini dikelola oleh berbagai instansi dengan Kementerian Pertahanan sebagai pemangku kebijakan utama. TNI dan Polri juga turut berperan dalam implementasi program ini di berbagai daerah melalui pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan kemasyarakatan. Struktur ini memastikan bahwa program dapat dijalankan secara sistematis dan terkoordinasi. Seperti yang disebutkan dalam laporan resmi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), “Kolaborasi antar-institusi dalam Pendidikan Bela Negara adalah kunci utama dalam membangun ketahanan nasional dan memperkuat karakter kebangsaan” (Tuhuteru, 2017; Zulfikar & Dewi, 2021).

Selain itu, budaya organisasi dalam Pendidikan Bela Negara menanamkan nilai-nilai disiplin, gotong royong, serta semangat kebersamaan dalam berbagai institusi. Program ini juga membentuk budaya kepatuhan terhadap hukum, loyalitas kepada NKRI, serta keterlibatan aktif dalam menjaga stabilitas nasional. Sejalan dengan prinsip tersebut, Kepala BPIP menyatakan, “Pendidikan Bela Negara bukan sekadar program, tetapi suatu gerakan nasional yang harus diterapkan secara nyata untuk membentuk karakter unggul bagi generasi penerus bangsa” (Putu & Karpika, 2023).

Dengan implementasi yang sistematis dan berkelanjutan, Pendidikan Bela Negara diharapkan mampu memperkuat karakter kebangsaan serta memperkokoh Pancasila sebagai ideologi negara yang tak tergantikan.

1.2 Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dirumuskan fokus utama penelitian ini adalah

1) Pelayanan pembinaan Kesadaran Bela Negara di Pusdiklat Rumpin Bogor
2) Penerpan Kurikulum Bela Negara di Pusdiklat Rumpin Bogor
3) Struktur Organisasi di Pusdiklat Rumpin Bogor

4) Budaya Organisasi di Pusdiklat Rumpin Bogor

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) terhadap SDM Pusdiklat Bela Negara Rumpin Bogor, rumusan masalah yang dapat diajukan adalah:

1) Bagaimana relevansi dan urgensi keberadaan Pusdiklat Bela Negara Rumpin dalam konteks kebutuhan nasional terkait pembinaan kesadaran bela negara? (Aspek *Context*)
2) Sejauh mana ketersediaan dan kualitas sumber daya (fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum) dalam mendukung efektivitas pelatihan bela negara? (Aspek *Input*)
3) Bagaimana efektivitas proses pelatihan bela negara yang diterapkan, termasuk metode pembelajaran, evaluasi tenaga pengajar, serta mekanisme monitoring dan pengawasan? (Aspek *Process*)
4) Bagaimana hasil dan dampak program Pusdiklat Bela Negara Rumpin dalam meningkatkan kapasitas tenaga pengajar, sertifikasi, serta pengembangan modul pendidikan bela negara yang relevan? (Aspek *Product*)

Rumusan masalah ini akan membantu dalam mengevaluasi efektivitas dan dampak program pendidikan bela negara yang dilaksanakan di Pusdiklat Rumpin.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang tepat berdasarkan model evaluasi CIPP (*Context*, *Input*, *Process*, *Product*) dalam analisis SDM Pusdiklat Bela Negara Rumpin Bogor dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Menganalisis peran dan relevansi Pusdiklat Bela Negara Rumpin dalam konteks kebutuhan nasional untuk pembinaan kesadaran bela negara, dengan mempertimbangkan tantangan strategis dan kebijakan pertahanan negara (Aspek Context).
2) Menilai ketersediaan dan kualitas sumber daya input termasuk fasilitas,

tenaga pengajar, dan kurikulum dalam mendukung efektivitas pendidikan bela negara (Aspek Input).

3) Mengevaluasi efektivitas proses pelatihan yang diterapkan, termasuk metode pembelajaran, strategi evaluasi, serta mekanisme monitoring dan pengawasan tenaga pengajar (Aspek Process).
4) Mengukur hasil dan dampak program (output dan outcome) dalam peningkatan kapasitas tenaga pengajar, sertifikasi, serta pengembangan modul pendidikan bela negara yang relevan dengan kebutuhan pertahanan negara (Aspek Product).

Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan dampak program di Pusdiklat Bela Negara Rumpin Bogor.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilaksanakan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan pelayanan Pendidikan Bela Negara serta menumbuhkembangkan Pembangunan karakter bangsa yang diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia membentuk kader bela negara, memberikan pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membina, memperbaiki dan atau membentuk aparatur negara dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai bela negara. Tidak kalah pentingnya adalah kesiapan manusia Indonesia untuk berkompetisi dengan bangsa lain di dunia, terutama kesiapan mental yang ditandai dengan terbangunnya karakter yang dibutuhkan guna menghadapi Indonesia Emas 2045. Apabila tidak ada turbulensi politik yang mengganggu stabilitas nasional,

Bank Dunia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas RI) memprediksikan bahwa Indonesia berpeluang untuk masuk 10 besar negara perekonomian terkuat di dunia pada 2030, dengan catatan kondisi Indonesia di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara terus membaik, Indonesia akan bersaing dengan negara-negara yang saat ini menguasai perekonomian dunia, seperti Amerika Serikat dan China. Bonus

demografi yang diperkirakan akan didapatkan Indonesia dalam kurun waktu tersebut merupakan kunci meningkatnya produktivitas dan sekaligus kemandirian perekonomian Indonesia.

1.6 State of The Art

Penelitian tentang pendidikan bela negara telah berkembang dalam berbagai aspek, mulai dari kebijakan hingga implementasi program di berbagai lingkungan sosial. Meskipun studi mengenai Pusdiklat Bela Negara Rumpin Bogor belum banyak dilakukan, beberapa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai perspektif mengenai pembinaan kesadaran bela negara di Indonesia.

Evaluasi Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) telah menjadi fokus penelitian oleh Murti et al., (2020) yang mengevaluasi efektivitas penyelenggaraan program PKBN di Badiklat Kemhan RI menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Studi ini menunjukkan bahwa program PKBN telah sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional dengan perencanaan kaderisasi yang jelas, pelaksanaan berbasis pelatihan, serta sistem pengawasan yang ketat dari berbagai lembaga terkait. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa keberlanjutan dan efektivitas program sangat bergantung pada struktur organisasi, kurikulum, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang tersedia (Murti et al., 2020).

Selain evaluasi kelembagaan, penelitian Ananto & Rofii, (2022) membahas persepsi masyarakat terhadap Program Bela Negara. Studi ini menyoroti adanya kesalahpahaman masyarakat yang menganggap program ini sebagai bentuk wajib militer. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik George Edward, penelitian ini mengidentifikasi bahwa variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, birokrasi, serta faktor eksternal seperti penggunaan internet, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan komunitas budaya memiliki peran signifikan dalam keberhasilan program bela negara. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman publik tentang

bela negara (Ananto & Rofii, 2022).

Dari perspektif implementasi di lingkungan pendidikan, penelitian Kholfan Zubair Taqo Sidqi (2019) menegaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai bela negara secara non-militer. Kurikulum di sekolah telah mengakomodasi pendidikan bela negara melalui pendidikan agama, kewarganegaraan, upacara bendera, kegiatan ekstrakurikuler, serta berbagai aktivitas kebudayaan dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bela negara dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan formal melalui kegiatan yang sesuai dengan perkembangan usia, kondisi fisik, dan psikologis siswa (Sidqi, 2019).

Pada tingkat perguruan tinggi, penelitian Rendy Prasatmadja (2018) menyoroti implementasi bela negara di kalangan mahasiswa. Studi ini menunjukkan bahwa bela negara tidak selalu berhubungan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap norma akademik, kedisiplinan dalam perkuliahan, serta kontribusi terhadap prestasi universitas dan masyarakat. Namun, terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam program bela negara, yang menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan ini (Permana, 2018).

Dari perspektif kebijakan dan kurikulum, penelitian Erlinda Matondang (2015) menelaah kurikulum pendidikan bela negara yang diterapkan oleh Kementerian Pertahanan. Kurikulum ini mencakup empat aspek utama, yaitu pelatihan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, pelatihan sesuai profesi, dan pelatihan ala TNI, dengan lima nilai dasar: cinta tanah air, rela berkorban, sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, serta kemampuan bela negara secara fisik maupun non-fisik. Studi ini mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan antara pertahanan militer dan nirmiliter dalam kurikulum bela negara, sehingga diperlukan revisi dalam metode pembelajaran agar lebih inklusif dan sesuai dengan konteks pertahanan semesta Indonesia (Matondang, 2015).

Dari berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan bela negara memiliki tantangan dalam aspek regulasi, struktur organisasi, kurikulum, metode pembelajaran, serta persepsi masyarakat.

Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh aspek kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan komunikasi yang efektif, kesiapan infrastruktur, serta integrasi yang optimal dalam sistem pendidikan formal maupun non-formal. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang berfokus pada evaluasi spesifik terhadap lembaga pendidikan bela negara seperti Pusdiklat Bela Negara Rumpin Bogor sangat diperlukan untuk memberikan kontribusi ilmiah yang lebih mendalam dalam penguatan karakter kebangsaan melalui pendidikan bela negara.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA